

BAB III

ORGANISASI WANITA TAMAN SISWA SEBAGAI WADAH DALAM MEMEBRDAYAKAN WANITA

3.1 Awal Lahirnya Organisasi Wanita Taman Siswa

Pada hakikatnya perempuan dan laki-laki itu sama, sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perempuan dan laki-laki dapat secara beringinan menjalankan tugas dan hak kewajiban masing-masing tanpa ada pandangan mana yang lebih kuat dan lemah. Perempuan “identik” dengan makhluk yang lemah lembut, Anggun, dan lainnya, dengan sebutan itulah perempuan semakin dianggap lemah oleh laki-laki.⁵⁴ Norma gender, aturan yang sering tidak diucapkan yang mengatur atribut dan perilaku yang dihargai dan dapat diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah apa yang menyatukan system gender. Norma-norma yang tertanam dalam institusi dan mendefinisikan siapa yang menduduki posisi kepemimpinan yang kontribusinya dihargai dan yang kebutuhannya diakomodasi.⁵⁵ Dengan cara ini, norma gender yang membatasi mereproduksi dan menopang hierarki kekuasaan di antara perempuan dan laki-laki.

Adat istiadat merupakan bagian integral dari norma-norma sosial yang bersifat tidak tertulis dan terbentuk melalui proses historis dalam kehidupan suatu

⁵⁴ Amanda Syakiyah Rahmanita. Gerakan Perempuan pada Abad 19-20. Journal Chronologia. Vol. 4. (1), 2022, hlm 46.

⁵⁵ Rebecca Pearse, Raewyn Conell, Gender Norms and the Economy: Insights from Social Reaserch, Feminist Economics, 2015, hlm 30-53

kelompok masyarakat. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk doktrin agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Namun, interpretasi yang keliru terhadap ajaran keagamaan sering kali membuka ruang bagi dominasi laki-laki yang bersifat sepihak, sehingga memicu tindakan represif dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga. Dalam konteks perkawinan, praktik-praktik yang merugikan perempuan banyak ditemukan, seperti perjodohan paksa, poligami, keberadaan selir, serta sistem *nyai* yang berkembang pada masa kolonial, yang keseluruhannya mencerminkan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang dilegitimasi oleh adat.⁵⁶ Dalam struktur kehidupan rumah tangga, peran perempuan sering kali dibatasi hanya sebatas mengurus urusan domestik seperti memasak, merawat anak, serta melayani suami. Posisi mereka dianggap sekadar sebagai pelengkap dalam kehidupan laki-laki, bukan sebagai individu yang memiliki eksistensi dan hak yang setara. Pandangan yang merendahkan ini berdampak serius, seperti maraknya praktik eksploitasi terhadap perempuan melalui perdagangan manusia, perceraian yang dilakukan sepihak, praktik poligami yang merugikan, serta terhambatnya akses perempuan terhadap pendidikan yang layak.⁵⁷

Pengaruh kuat dari sistem feodal yang mengakar dalam adat istiadat menjadi salah satu hambatan utama yang sulit ditembus oleh perempuan Indonesia pada masa itu. Feodalisme secara nyata menciptakan batas tegas yang membedakan

⁵⁶ A. Fatikhul Amin Abdullah, *Perempuan Indonesia Sampai Awal Abad ke-20*, ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1 (1), 2019, hlm 21.

⁵⁷ A. K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1987), hlm 22.

status sosial antara laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi Jawa, misalnya, seorang perempuan bangsawan yang menginjak usia remaja diwajibkan menjalani masa karantina atau “pingitan”, di mana ia dilarang untuk keluar rumah dan berinteraksi bebas dengan dunia luar.⁵⁸ Selama menjalani masa pingitan, perempuan tidak memiliki akses untuk berkomunikasi dengan dunia luar hingga tiba saatnya mereka dinikahkan dengan pria pilihan orang tua. Sering kali, calon suami tersebut adalah sosok asing bagi mereka—bukan hanya belum dikenal, tetapi juga sering kali jauh lebih tua usianya, bahkan telah memiliki beberapa istri sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu, para gadis tidak memiliki kuasa untuk menolak perjodohan tersebut. Satu-satunya cara yang diyakini dapat mengangkat derajat dan posisi kaum perempuan agar tidak terus-menerus dipandang rendah adalah melalui jalur pendidikan.⁵⁹

Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam proses pertumbuhan dan pembentukan bangsa Indonesia hingga masa kini. Namun, dalam realitasnya, di wilayah Jawa, akses terhadap pendidikan pada awalnya menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Dalam lintasan sejarah pendidikan, hingga memasuki awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1900 Masehi, perempuan masih belum menjadi perhatian utama dalam hal pendidikan. Kesempatan untuk menempuh pendidikan masih didominasi oleh kaum laki-laki, yang memperoleh

⁵⁸ Eka Sulis Yuniarti, Pendidikan Bagi Perempuan Jawa pada Abad Ke 19.Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, Vol. 12 (1), 2018, hlm 30-38.

⁵⁹ Amalina Haidah, Kiprah Organisasi Wanita Taman Siswa dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan Perempuan Indonesia, KRINOK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi, Vol 2. (3), 2023, hlm 29.

akses serta peluang yang jauh lebih luas dibandingkan perempuan, yang sering kali dipinggirkan dari dunia pendidikan.

Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh munculnya Politik Etis yang diprakarsai oleh Van Deventer. Ia dengan tegas mengecam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap rakyat pribumi. Dalam pandangannya, pemerintah Belanda telah meraup keuntungan besar dan mengisi kekosongan kas negara dengan memanfaatkan keringat dan penderitaan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, menurut Van Deventer, utang moral tersebut harus dibalas dengan meningkatkan taraf hidup rakyat di wilayah jajahan, salah satunya melalui pengembangan pendidikan.⁶⁰ Menurut pemikiran Locher Scholten, politik etis dipandang sebagai upaya untuk mengarahkan serta membimbing rakyat bumiputera menuju kemajuan, agar kelak dapat meraih kemerdekaan sesuai dengan model Barat, di mana penjajahan memainkan peran sebagai pemandu. Politik etis ini dianggap sebagai pendekatan terbaik dalam memperlakukan wilayah jajahan, khususnya karena memberikan akses terhadap pendidikan Barat bagi masyarakat Indonesia. Dampak positif dari kebijakan ini sangat terlihat terutama di sektor pendidikan, yang mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pendidikan, termasuk bagi kaum perempuan.

Pada permulaan abad ke-20, penerapan politik etis menandai dimulainya babak baru dalam dunia pendidikan yang menunjukkan arah lebih maju. Meskipun

⁶⁰ *Ibid*, hlm 28

pendidikan dijadikan sebagai prioritas utama dan simbol semangat politik etis, realitasnya menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan modern bagi masyarakat pribumi masih sangat terbatas. Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda ternyata lebih berorientasi pada kepentingan mereka sendiri. Hal ini tercermin dari tujuan pendidikan yang diarahkan untuk mencetak tenaga kerja yang terampil namun murah, guna mendukung kebutuhan tenaga di perkebunan serta posisi administrasi di kantor-kantor pemerintahan. Lebih jauh lagi, sistem persekolahan juga disusun secara diskriminatif, berdasarkan ras dan strata sosial, yang menempatkan penduduk bumiputera pada lapisan paling bawah dalam hierarki pendidikan.⁶¹

Perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan pada masa kolonial dipercayakan kepada J.H. Abendanon, yang menjabat sebagai Kepala Departemen Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1900. Sosok Abendanon dikenal luas karena keterlibatannya dalam isu-isu perempuan Jawa, bahkan dianggap sebagai figur penting yang menandai awal mula munculnya gerakan feminisme di Indonesia. Salah satu tokoh sentral dalam perkembangan gerakan feminis di tanah Jawa adalah R.A. Kartini. Ia dikenal melalui kumpulan suratnya yang penuh keluh kesah dan refleksi kritis mengenai ketidakadilan sosial yang dialaminya sebagai perempuan. Hidup dalam lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai feodalisme, Kartini menyaksikan bagaimana para perempuan di sekitarnya dibatasi ruang geraknya. Melalui tulisan-tulisannya, ia berupaya memerdekaan

⁶¹ Muhammad Fakhriansyah, Intan Ranti Permatasari Patoni. Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930). *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol 8 (2). 2019. Hlm 124.

kaum perempuan dari tekanan budaya patriarki dan sistem sosial feodal yang mengekang kebebasan mereka.⁶² Penyebaran surat-surat Kartini memberikan pengaruh besar dalam membangkitkan semangat perjuangan generasi muda Indonesia. Tidak hanya itu, tulisan-tulisannya juga berhasil menarik perhatian internasional, khususnya dalam mendukung gerakan feminism, baik di dalam negeri maupun di berbagai negara lainnya. Keberhasilan penerbitan surat-surat tersebut tidak lepas dari peran penting Abendanon, yang memberikan dukungan penuh terhadap publikasi karya Kartini yang ditulis dalam bahasa Belanda.

Usaha-usaha yang dilakukan R.A Kartini telah membawa hasil. Jalan emansipasi wanita telah dibuka. Usaha tersebut dilanjutkan oleh *Poetri Mardika* yang lahir pada tahun 1912 di Jakarta. Poetri Mardika diprakarsai oleh Budi Oetomo. Tujuan Poetri Mardika adalah memberi bantuan, bimbingan dan penerangan bagi kaum wanita pribumi mengenai hak pendidikan, hak bekerja di luar rumah, mengemukakan pendapat di muka umum, menhilangkan rasa rendah diri dan meningkatkan harkat, martabat dan derajat kaum wanita sejajar engan kaum pria.⁶³ Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong Nyi Hadjar Dewantara untuk meneruskan cita-cita Kartini. Jalur yang ditempuh Nyi Hadjar Dewantara sama dengan Kartini ialah bidang pendidikan. Nyi Hadjar Dewantara atau Raden Ajeng Sutartinah bersama ibu-ibu lainnya diantaranya Ibu Rumsiah, Ibu Jumilah, Ibu Siti Marsidah dan Ibu Sutatmo mendirikan Organisasi Wanita Taman Siswa.

⁶² Ratih Yuswita Sari. Representasi Emansipasi Wanita dalam Film “Kartini”. JOM FISIP. Vol 6 (1). 2019. Hlm 2.

⁶³ Sukanti Suryochondro. *Potret Pergerakan Wanita Indonesia*. (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm 84.

Organisasi Wanita Taman Siswa adalah organisasi wanita dalam lingkungan Taman Siswa yang berasas dan bertujuan sama dengan Taman Siswa. Organisasi Wanita Taman Siswa yang pertama-tama keberadaanya ada di Yogyakarta pada 3 Juli 1922.⁶⁴ Organisasi Wanita Taman Siswa maupun Taman Siswa merupakan lembaga kebudayaan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan anak didik menjadi manusia yang berbudaya dan berkesadaran nasional.⁶⁵ Walaupun keberadaan organisasi Wanita Taman Siswa terbatas hanya di lingkungan Persatuan Taman Siswa, namun kontribusi dan aktivitasnya tidak kalah signifikan dibandingkan dengan organisasi wanita lainnya. Organisasi ini tetap menunjukkan partisipasi aktif dalam upaya memperjuangkan hak, martabat, dan kedudukan kaum perempuan. Di samping itu, Wanita Taman Siswa senantiasa mengabdikan diri demi kepentingan rakyat dan bangsa.⁶⁶

Dalam mendirikan Taman Siswa, baik Ki Hadjar Dewantara maupun Nyi Hadjar Dewantara tidak memiliki kepentingan pribadi maupun keluarga. Lembaga pendidikan ini lahir dari tekad luhur dan pemikiran yang jernih sebagai wujud pengabdian kepada cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.⁶⁷ Seiring meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam Taman Siswa baik sebagai pengajar, pasangan dari pengajar, maupun sebagai peserta didik muncul berbagai persoalan yang berkaitan dengan isu-isu perempuan. Persoalan-persoalan tersebut

⁶⁴ Yulianti. Konsep Pendidikan Perempuan di Taman Siswa. *Jurnal Sejarah dan Budaya*. Vol. 10 (1). 2016, hlm 114.

⁶⁵ Darsiti Soeratman. *Wanita Taman Siswa dan Hidup Kekeluargaan*. (Yogyakarta: Badan Pusat Wanita Tamansiswa, 1979), hlm 20.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 63-64.

⁶⁷ Bambang Sukawati Dewantara, *Nyi Hajar Dewantara dalam Kisah dan Data*. (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984). Hlm 115-117.

mencakup antara lain: pendidikan khusus bagi anak perempuan, pelatihan keterampilan untuk kaum putri, perlindungan terhadap remaja perempuan, pelanggaran terhadap etika dan kesopanan terhadap atau oleh perempuan, hingga perkara yang berkaitan dengan kesucian, moralitas, perilaku sehari-hari, tata busana perempuan, serta bacaan yang dianggap pantas untuk anak perempuan.⁶⁸ Taman Siswa tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut secara sepahak, sehingga peran aktif dari perempuan di lingkungan Taman Siswa menjadi sangat penting. Sejak awal berdirinya Taman Siswa, tanggung jawab ini telah diemban oleh Nyi Hadjar Dewantara. Tujuan utama dari pendidikan perempuan yang ia kembangkan adalah untuk meningkatkan kemajuan perempuan melalui pendidikan, namun tetap menghargai dan mempertahankan kodrat alaminya sebagai seorang ibu.

Para perempuan pada masa itu telah memiliki kesadaran akan pentingnya turut serta mendukung keberlangsungan Taman Siswa melalui berbagai bentuk kontribusi yang dapat mereka berikan. Walaupun demikian, pada saat itu keberadaan mereka belum terorganisasi secara formal dalam bentuk sebuah lembaga perempuan seperti yang dikenal sekarang sebagai Organisasi Wanita Taman Siswa. Secara tidak resmi, kelompok ini telah menjalankan peran dan tanggung jawab yang kemudian dilembagakan dalam organisasi tersebut. Namun, kemampuan Organisasi Wanita Taman Siswa dalam menghimpun keanggotaan masih sangat terbatas. Jumlah anggotanya tidak banyak karena keanggotaannya hanya mencakup pamong perempuan dan istri pamong saja. Meski demikian,

⁶⁸ *Ibid*, hlm 256.

seiring berjalannya waktu dan perkembangan organisasi, Wanita Taman Siswa mulai berhasil menarik anggota-anggota perempuan lainnya yang berada dalam lingkup Taman Siswa, yakni mereka yang memiliki kesamaan pandangan terhadap asas serta tujuan yang diusung oleh organisasi tersebut.⁶⁹

Sebelum Vrouwenraad atau Majelis Wanita secara resmi didirikan, sejumlah tokoh perempuan seperti Nyi Hadjar Dewantara, Nyi Soetatmo Soerjokoesoemo, Nyi Soedarminta, Nyi Soenarjati Soekemi, Ni Soerip, serta Ni Istri Kartini, telah lebih dahulu terlibat aktif secara tidak resmi dalam kegiatan yang menjadi cikal bakal Vrouwenraad. Keterlibatan mereka mencerminkan bahwa eksistensi Majelis Wanita sangat bergantung pada keaktifan pamong perempuan. Jika dilihat dari sudut organisasi, sejak masa itu para pamong perempuan telah berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai keperempuanan melalui proses pendidikan terhadap peserta didik. Peran tersebut dijalankan dalam kapasitas mereka sebagai anggota Majelis Wanita (Vrouwenraad) dalam lingkup keluarga besar Taman Siswa.⁷⁰ Meskipun pada awalnya belum terbentuk secara resmi sebagai sebuah badan organisasi dan masih berstatus sebagai Badan Penasehat, namun peran serta tanggung jawabnya telah dijalankan sejak awal berdirinya Taman Siswa. Nyi Hadjar Dewantara memperkenalkan semboyan “Suci Tata Ngesti Tunggal” sebagai panduan moral bagi Wanita Taman Siswa dalam menjalankan tugasnya bagi kepentingan sesama perempuan, bangsa, dan negara. Semboyan ini mengandung makna: “Suci” melambangkan kebersihan hati, “Tata” mencerminkan ketertiban

⁶⁹ Darsiti Soeratman. *op.cit.* hlm 64

⁷⁰ *Ibid*, hlm 65

dalam perilaku lahiriah, “Ngesti” menunjukkan tekad untuk menuju cita-cita, dan “Tunggal” berarti persatuan atau kesempurnaan dalam pengabdian.⁷¹

Pada tahun 1923, Wanita Taman Siswa secara resmi menjadi bagian dari struktur Organisasi Taman Siswa melalui pembentukan Majelis Wanita, yang dikenal juga dengan nama *Vrouwenraad*. Dalam perjalanannya, Wanita Taman Siswa turut ambil bagian dalam Kongres Perempuan Indonesia. Semangat perjuangan perempuan Indonesia semakin berkobar setelah Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928, yang menyerukan persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat tersebut mendorong terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928. Dari rangkaian kegiatan kongres yang berlangsung hingga 25 Desember di Pendopo Jayapuran, Yogyakarta, lahirlah sebuah organisasi perempuan bernama Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), yang secara resmi didirikan pada 25 Desember 1928.⁷² Pada tahun 1929, PPPI mengalami pergantian nama menjadi Perserikatan Perkoempoelan Isteri Indonesia (PPII). Dalam Kongres PPII yang berlangsung pada tahun 1930 di Surabaya, ditetapkan asas perjuangan organisasi yang berbunyi: *"Kongres berasaskan Kebangsaan Indonesia, menjunjung kewanitaan, meneguhkan imannya."* Prinsip tersebut menjadi landasan

⁷¹ Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia. *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia 1928-1978*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). Hlm 315.

⁷² Mayling Oey-Gardiner, Mildred L.E Wageman. *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996). Hlm 292-297.

utama dalam mengarahkan perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam pergerakan nasional.⁷³

Dalam rentang waktu antara tahun 1932 hingga 1936, cabang-cabang Wanita Taman Siswa mulai bermunculan di berbagai daerah di luar Yogyakarta. Melalui pelaksanaan Rapat Besar atau Konferensi Taman Siswa yang pertama kali diadakan pada tahun 1932, keberadaan Badan Wanita Taman Siswa secara resmi diakui melalui penetapan *Rancangan Tentang Pendirian Persatuan Wanita Taman Siswa*. Dalam struktur organisasi tersebut, Badan Pengurus Pusat berlokasi di Majelis Pusat Wanita Taman Siswa. Selain itu, disepakati pula bahwa Wanita Taman Siswa wajib memiliki perwakilan dalam Majelis Luhur, agar aspirasi dan suara perempuan juga turut mewarnai pengambilan keputusan di tingkat tertinggi organisasi tersebut.⁷⁴

Untuk menjaga kesesuaian dengan pemahaman formal, istilah "lahir" tidak digunakan oleh Wanita Taman Siswa. Sebagai gantinya, mereka memilih kata "keberadaan" atau "kehadiran" untuk merujuk pada awal mula organisasi tersebut. Oleh karena itu, tanggal 3 Juli tidak disebut sebagai hari kelahiran Wanita Taman Siswa, melainkan dikenal sebagai Hari Wanita Taman Siswa. Pergeseran istilah ini muncul setelah berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama.⁷⁵ Seperti halnya Tamansiswa yang secara resmi baru dibentuk sebagai organisasi pada tahun 1930, meskipun telah ada sejak 1922 namun belum memiliki ikatan

⁷³ Khairul Tri Anjani, Yeni Handayani. Sejarah Perkembangan Organisasi Wanita Taman Siswa di Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Sejarah Unindra, 2019. Vol 3 (2), Hlm 5

⁷⁴ Mangoensarkoro, S. Pendidikan Anak Perempuan. Poesara Djilid 1 No. 1-2. 1931, hlm 7

⁷⁵ Badan Pusat Wanita Tamansiswa. *Kenangan Tujuh Dasa Warsa Wanita Tamansiswa 3 Juli 1922-3 Juli 1992*. (Yogyakarta: Badan Pusat Wanita Tamansiswa, 1992). Hlm 7.

organisasi yang formal demikian pula Organisasi Wanita Tamansiswa baru diakui secara resmi sebagai Badan Wanita Tamansiswa pada tahun 1931. Pengakuan ini merupakan hasil keputusan Konferensi Daerah Jawa Tengah yang diselenggarakan di Yogyakarta, dan rencananya akan memperoleh pengesahan lebih lanjut dalam Konferensi Nasional (Rapat Besar). Pengurus Tamansiswa, Majelis Wanita Tamansiswa yang sudah ada menjadi penasihat Badan Wanita Tamansiswa tersebut, sebagai pengurus yang dipilih dalam konferensi tersebut adalah:

Nama	Jabatan
Nyi Hadjar Dewantara	Ketua
Ni Surip	Panitera
Nyi Sudarminto	Anggota
Nyi S. Sukemi	Anggota
Nyi Sri Mangunsarkoro	Wakil Pusat di Jawa Barat
Nyi Sudjarwo	Wakil Pusat di Jawa Timur

Gambar 2. Susunan Pengurus Organisasi Wanita Taman Siswa

Konferensi ini menjadi momen penting yang menandai terbentuknya Organisasi Wanita Taman Siswa secara resmi. Organisasi ini lahir karena memiliki tujuan yang terarah dan tegas, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih tertib dan damai. Tujuan tersebut diketahui secara luas dan diyakini oleh seluruh anggotanya sebagai suatu kebenaran. Untuk memastikan kelancaran jalannya organisasi, disusunlah sejumlah peraturan yang diterima dan disepakati bersama oleh para anggota.

Organisasi Wanita Taman Siswa memiliki visi utama untuk menjaga martabat dan keselamatan perempuan, yang dianggap sangat berkaitan erat dengan keutuhan dan kemurnian keluarga, masyarakat, serta bangsa secara keseluruhan. Sementara itu, misi organisasi ini tercermin dalam pasal-pasal tujuannya, salah satunya menegaskan pentingnya kesadaran perempuan akan kodratnya sebagai penerus generasi dan penjaga keturunan.⁷⁶ Salah satu elemen penting dalam keberlangsungan suatu organisasi adalah terjalinya relasi yang kuat dan selaras, yang didasarkan pada kepentingan bersama. Keharmonisan ini tidak hanya berlaku pada pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi, tetapi juga tercermin dalam interaksi antar individu yang menjalankan peran masing-masing. Sebagai organisasi yang memiliki otonomi, kehidupan internal Wanita Taman Siswa diatur melalui Peraturan Besar Wanita Taman Siswa. Sementara itu, pola kerja organisasi antara Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dan Badan Pusat Wanita Taman Siswa disusun melalui sebuah Surat Keputusan Bersama, hasil dari kesepahaman dan kerja sama antara kedua pihak tersebut.⁷⁷

3.2 Azas dan Struktur Organisasi Wanita Taman Siswa

Organisasi Wanita Taman Siswa hadir dalam lingkungan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Kehadiran Organisasi Wanita Taman Siswa adalah untuk membantu Taman Siswa dalam segala usahanya terutama menciptakan masyarakat tertib damai.⁷⁸ Perkembangan Organisasi Wanita Taman

⁷⁶ Boerhanoeddin Lubis. *Taman Siswa Bunga Rampai Sampai Pemikiran*. (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 2000), hlm 300-301.

⁷⁷ Kowani, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm 46.

⁷⁸ Badan Pusat Wanita Tamansiswa, *Peraturan Besar Wanita Taman Siswa, Keputusan Kongres XVI Wanita Tamansiswa*. (Yogyakarta: Badan Pusat Wanita Tamansiswa, 1996), hlm 21.

Siswa berazas dan bertujuan sama dengan Taman Siswa yang berpedoman pada teori, azas-azas Taman Siswa yang dibentuk pada tahun 1922, adat istiadat Taman Siswa, semboyan-seboyan Taman Siswa dan Peraturan Besar Wanita Taman Siswa. Teori organisasi yang menjadi pedoman Organisasi Wanita Taman Siswa, sebagai berikut:

1. Kodrat irodatnya hidup manusia yang berwujud perempuan dan laki-laki itu, sungguhan mengandung maksud dan kekalnya turunan, dalam hal mana laki-laki menjadi jaler atau tiang keturunan, dan seorang perempuan menjadi pemangku keturunan.
2. Dalam pangkal hidupnya, perempuan dan laki-laki itu hak dan harga diri mereka sama, sedangkan perbedaan antara mereka itu hanya mengenai perbedaan hidup lahir dan batin yang khususnya untuk masing-masingnya.
3. Manusia sebagai makhluk yang harus Insaf akan hidupnya, wajib berusaha akan kekalnya dan baiknya turunan sesuai dengan kemauan kodrat alam, sebagai bukti dari beberapa alamat yang dalam hakikatnya bermaksud mengkekalkan dan memperbaiki keturunan itu melawan segala perbuatan dan keadaan yang merintangi kekal dan baiknya turunan itu.
4. Segala syarat untuk mencapai kekal dan baiknya turunan, haruslah bermaksud memperteguh rasa kesucian dalam batinnya manusia bersama, seperti terkandung dalam syarat-syarat agama, adat, dan hukum.
5. Menurut kodrat irodatnya hidup dan terbukti dari Riwayat kemanusiaan jaman purbakala, maka amat bersalah pengaruhnya perempuan sebagai pemangku keturunan atas bertumbuhnya rasa kesucian dan ketertiban, sehingga

pendidikan anak-anak atas pembangunan masyarakat tidak akan sempurna, jika tidak mempergunakan pengaruh perempuan yang baik.

6. Dimana Taman Siswa mewujudkan dirinya Keluarga Besar yang suci, maka berhak dan berwajiblah kaum perempuan di dalam kalangan Taman Siswa selalu mempergunakan perngaruh perempuannya yang menuju ke arah kesucian dan ketertiban di dalam masyarakat Taman Siswa.
7. Oleh karena itu Wanita Taman Siswa adalah sebagian dari badan Taman Siswa, maka segala syarat keperempuan yang diadakan olehnya, tidaklah boleh menyalahi azas Taman Siswa dan harus sesuai dengan kebangsaan dalam maksud yang sejati, ayitu memperteguh adan kemanusiaan.⁷⁹

Azas-azas Taman Siswa Tahun 1922 merupakan pedoman Organisasi Wanita Taman Siswa yang tentu saja maksud dan tujuan Wanita Taman Siswa tidak boleh menyalahi hakikat Taman Siswa yang tercantum dalam azas Taman Siswa, sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan syarat menjunjung ketertiban dan kedamaian kehidupan manusia.
2. Pendidikan dan pengajaran menggunakan “Among Metode” atau sistem Among, artinya para pamong memberi kemerdekaan batin, pikiran dan tenaga kepada anak didiknya.
3. Pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kultur bangsa sendiri terutama dalam menghadapi perkembangan jaman.

⁷⁹ Panitia Badan Pusat Wanita Tamansiswa. Wanita -Taman-Siswa Azas (*Praeadvies Badan poesat Harian dari Wanita-Taman-Siswa*). Majalah Pusara Jilid III, No 10. 1933. Hlm 151.

4. Pengajaran diperluas khususnya untuk rakyat banyak.
5. Usaha-usaha yang dilakukan menurut kekuatan sendiri dan tidak tertutup kemungkinan menerima bantuan dari orang lain, tanpa mengikat kemerdekaan kita sendiri.
6. Biaya pengeluaran ditanggung menurut kekuatan sendiri.
7. Kewajiban para pamong adalah berhamba kepada sang anak.⁸⁰

Struktur Organisasi Wanita Taman Siswa, sebagai berikut:

1. Badan Pusat Wanita Taman Siswa dipimpin oleh Pengurus Badan Pusat Wanita Taman Siswa. Badan Pusat Wanita Taman Siswa terdiri atas empat kelengkapan, yaitu:
 - a. Dewan Pinisepuh,
Dewan Pinisepuh terdiri atas dua orang anggota yang mempunyai masa keanggotaan sekurang-kurangnya dua puluh tahun.
 - b. Dewan Pakar,
Dewan Pakar ditentukan oleh Badan Pusat Wanita Taman Siswa yang diangkat dari anggota maupun bukan anggota Taman Siswa namun mempunyai keahlian yang diperlukan oleh organisasi.
 - c. Majelis Luhur Pusat Taman Siswa,
Majelis Luhur Pusat Taman Siswa ditetapkan oleh Pimpinan Badan Pusat Wanita Taman Siswa.

⁸⁰ Ki Hadjar Dewantara, *Azas dan Dasar-dasar Taman Siswa*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Tamansiswa, 1964), hlm 7.

d. Badan Pengawas,

Anggota organisasi yang mempunyai masa keanggotaan sekurangnya sepuluh tahun dan mempunyai wewenang mengawas ketertiban organisasi.

2. Wanita Taman Siswa Daerah, yaitu Organisasi Wanita Taman Siswa yang berada di bawah Badan Pusat Wanita Taman Siswa. Wanita Taman Siswa Daerah mempunyai dua kelengkapan, yaotu Badan Khusus Organisasi Wanita dan Pembina Daerah Taman Siswa.

3. Wanita Taman Siswa Cabang,

Hubungan antara Wanita Taman Siswa cabang dengan Badan Pusat Wanita Taman Siswa dilakukan secara langsung atau juga dapat melalui Wanita Taman Siswa Daerah.

4. Kongres Wanita Taman Siswa

Kongres diadakan setiap lima tahun sekali yang dihadiri oleh utusan Wanita Taman Siswa Daerah dan Wanita Taman Siswa Cabang.⁸¹

⁸¹ Wanita Taman Siswa, *Peraturan Besar Wanita Taman Siswa*, (Yogyakarta: Wanita Taman Siswa, 2006). Hlm 55.



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Wanita Tamansiswa

3.3 Peraturan Besar Organisasi Wanita Taman Siswa

BAGIAN PERTAMA

PERATURAN DASAR

BAB I

UMUM

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

- 1) Organisasi ini bernama Wanita Tamansiswa disingkat Wanitas
- 2) Wanita Tamansiswa adalah organisasi di lingkungan Tamansiswa
- 3) Wanita Tamansiswa berpusat dan bertempat kedudukan di Yogyakarta

Pasal 2**Waktu**

Wanita Tamansiswa hadir sejak 3 Juli 1922 bersamaan dengan kelahiran Tamansiswa, sampai waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3**Hari Wanita Tamansiswa**

Tanggal 3 Juli merupakan Hari Wanita Tamansiswa.

Pasal 4**Asas**

Wanita Tamansiswa berasaskan Pancasila.

Pasal 5**Maksud**

Wanita Tamansiswa bermaksud memberi wadah kepada para wanita, khususnya anggota keluarga serta pecinta Tamansiswa untuk menyumbangkan darma baktinya kepada Tamansiswa, masyarakat, dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 6**Tujuan**

Menyadari kodrat wanita sebagai pemangku keturunan, Wanita Tamansiswa bertujuan:

- a. Meningkatkan anggota agar menjadi ibu bagi generasi penerus yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudi pekerti luhur.
- b. Mengembangkan pengaruh keperempuanannya secara optimal dan positif untuk:
 - 1) Mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, Bahagia, dan Sejahtera.
 - 2) Menjaga kesucian dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Tamansiswa.
 - 3) Mewujudkan masyarakat tertib damai dan salam Bahagia, sesuai dengan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.
- c. Membantu perkembangan generasi penerus di bidang kebudayaan dan peradaban.

Pasal 7

Sifat dan Ciri Khas

- 1) Wanita Tamansiswa bersifat kekeluargaan yang berarti perpaduan demokrasi dan pimpinan kebijaksanaan.
- 2) Wanita Tamansiswa berciri khas Pancadarma:
 - a. Kodrat Alam
 - b. Kemerdekaan
 - c. Kebudayaan
 - d. Kebangsaan

e. Kemanusiaan

Pasal 8

Kewajiban

Wanita Tamansiswa berkewajiban:

- a. Membantu Tamansiswa dalam segala usahanya di bidang:
 - 1) Kebudayaan dan pendidikan pada umumnya, khususnya pendidikan peradaban kewanitaan.
 - 2) Penyebarluasan ajaran hidup Tamansiswa.
- b. Bekerjasama dengan organisasi wanita lainnya dalam meningkatkan harkat dan martabat wanita di bidang kebudayaan dan pendidikan nasional.
- c. Berperan serta dalam Pembangunan Nasional.

Pasal 9

Usaha

Untuk mencapai tujuannya Wanita Tamansiswa berusaha:

- a. Melaksanakan kegiatan dalam bidang IPOLEKSOSBUD (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- b. Memelihara hubungan kekeluargaan dalam lingkungan Tamansiswa.
- c. Mengadakan hubungan organisasi dengan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Tamansiswa Cabang, Lembaga-lembaga di lingkungan Tamansiswa baik tingkat pusat, daerah dan cabang.

- d. Mengadakan hubungan Kerjasama dengan keluarga besar Tamansiswa, antara lain unsur alumni, dan pemuda di tingkat pusat, daerah, dan cabang.
- e. Mengadakan hubungan dengan dunia pergerakan wanita di luar Wanita Tamansiswa.
- f. Mengadakan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan asas, ciri khas, dan tujuan Wanita Tamansiswa.⁸²

⁸² Wanita Taman Siswa, *Peraturan Besar Wanita Taman Siswa*, (Yogyakarta: Wanita Taman Siswa, 2011). hlm 9-11.